

# **LKjIP**

## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan dengan baik penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sebagai wujud pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Sumenep yang memuat informasi tentang pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2020.

Penyusunan LKjIP BPBD Kabupaten Sumenep Tahun 2020 ini juga merupakan pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kepada masyarakat dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep. Hal ini merupakan tindak lanjut dari perencanaan strategik untuk mendukung budaya transparansi, yaitu lebih merupakan upaya pertanggungjawaban setiap program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami harapkan masukan konstruktif dan inovatif dari semua pihak guna perbaikan dan kesempurnaan penyusunan LKjIP tahun berikutnya untuk dapat menggambarkan bentuk pertanggungjawaban yang lebih baik serta dapat meningkatkan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumenep, Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
ex-officio KEPALA BPBD

**Ir. EDY RASIYADI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650808 199003 1 014

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| Kata Pengantar .....  | i  |
| Daftar Isi .....  | ii |
| <br>  |    |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1  |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....  | 6  |
| A. Perencanaan .....  | 6  |
| 1. Visi .....   | 6  |
| 2. Misi .....   | 7  |
| 3. Tujuan dan Sasaran .....   | 8  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....   | 13 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....   | 13 |
| 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja .....  | 14 |
| 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian<br>Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun<br>Terakhir .....                               | 15 |
| 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun<br>Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam<br>Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi ..... | 17 |
| 4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan / Penurunan<br>Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan .....   | 18 |
| 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....   | 20 |
| 6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan<br>Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....   | 23 |
| B. Realisasi Anggaran .....   | 29 |
| BAB IV PENUTUP .....  | 31 |

# Bab I

# Pendahuluan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana dan Sekretaris Daerah sebagai Kepala Ex Officio Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## **Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 17 Tahun 2012 dalam melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Daerah dan menyelenggarakan fungsi, meliputi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
4. Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

5. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
6. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
7. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
8. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
9. Mempertanggung-jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pada realisasinya Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Sumenep memiliki bermacam golongan potensi bahaya, berikut bencana yang sering terjadi dengan frekuensi yang berpotensi bahaya tergolong **TINGGI** di Kabupaten Sumenep adalah, sebagai berikut :

- a. Cuaca Ekstrim berupa Angin Puting Beliung dan hujan lebat yang disertai angin kencang serta Banjir ROB yang setiap tahun selalu melanda Kabupaten Sumenep di saat memasuki Musim Penghujan . Hal ini disebabkan oleh letak geografis Kabupaten Sumenep yang dikelilingi oleh lautan serta kurangnya penghijauan di beberapa tempat, seperti di daerah Pinggir Papas dan Karang Anyar Kecamatan Kalianget serta wilayah Kecamatan Kota daerah lainnya yang tandus ;
- b. Kekeringan yang setiap tahun terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Sumenep di saat memasuki Musim Kemarau. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Kabupaten Sumenep sebagian daratan pegunungan dan daerahnya yang tandus serta merupakan daerah tadah hujan ;
- c. Gelombang Ekstrim dan Abrasi yang setiap tahun sering terjadi kecelakaan laut. Hal ini disebabkan Kabupaten Sumenep merupakan daerah kepulauan.

Sedangkan bencana dan aneka kejadian dengan frekuensi yang berpotensi bahaya tergolong **SEDANG** seperti Banjir, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Kebakaran yang sering terjadi setiap tahun pada setiap pergantian musim. Bencana dengan frekuensi yang berpotensi bahaya tergolong **RENDAH** seperti Epidemik dan Wabah Penyakit, Kegagalan Teknologi Tsunami dan Konflik Sosial yang terjadi setiap saat/waktu.

Berikut kejadian Bencana yang terjadi selama Tahun 2020, sebagai berikut :

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| a. Angin Puting Beliung         | : 151 Kali ; |
| b. Angin Kencang                | : 22 Kali ;  |
| c. Angin Kencang disertai hujan | : 65 Kali ;  |
| d. Hujan Deras                  | : 9 Kali ;   |
| e. Tanah Longsor                | : 2 Kali ;   |
| f. Kebakaran                    | : 132 Kali ; |
| g. Kecelakaan Laut dan Sungai   | : 14 Kali ;  |
| h. Sambaran Petir               | : 1 Kali ;   |
| i. Kesetrum Listrik/Arus Pendek | : 1 Kali ;   |
| j. Lain-lain                    | : 1 Kali.    |

Jumlah korban jiwa, kerusakan rumah pemukiman dan fasilitas umum serta lain-lain akibat dari kejadian bencana tersebut :

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| a. Meninggal                        | : 15 Jiwa ;  |
| b. Luka Parah                       | : 5 Jiwa ;   |
| c. Luka Sedang                      | : 3 Jiwa ;   |
| d. Luka Ringan                      | : 7 Jiwa.    |
| e. Rumah                            |              |
| - Rusak Total                       | : 18 Buah ;  |
| - Rusak Berat                       | : 32 Buah ;  |
| - Rusak Sedang                      | : 41 Buah ;  |
| - Rusak Ringan                      | : 164 Buah.  |
| f. Fasilitas Umum                   |              |
| - Sarana Ibadah (Masjid/Mushollah)  | : 4 buah ;   |
| - Sarana Pendidikan (Sekolah)       | : 4 buah ;   |
| - Sarana Tempat Usaha               | : 117 buah ; |
| - Sarana Transportasi Laut (Perahu) | : 4 buah.    |
| g. Lain-lain                        |              |
| - Perabot Rumah Tangga              | : 2 KK ;     |

## **Permasalahan dan Solusi**

Berdasarkan adanya frekuensi potensi bencana bahaya yang berada di Kabupaten Sumenep tersebut maka timbullah suatu permasalahan dan solusi yang harus dihadapi di OPD yaitu sebagai berikut :

### **1) Permasalahan :**

Pada setiap pelaksanaan kegiatan pasti tidak dapat lepas dari permasalahan atau hambatan, hanya yang membedakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain adalah intensitas dari permasalahan atau hambatan yang dihadapi.

Di bawah ini beberapa permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep tahun 2020, antara lain:

- a) Terbatasnya kemampuan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangani program dan perencanaan serta penanggulangan bencana ;
- b) Terbatasnya jumlah personil karena telah memasuki masa pensiun, mutasi jabatan (promosi) dan meninggal dunia, sampai saat ini belum ada penggantinya ;
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana khususnya sarana komunikasi antar kecamatan utamanya kecamatan kepulauan.
- d) Adanya refokusing anggaran untuk penanganan Covid-19 sehingga anggaran mengalami pengurangan.

### **2) Solusi :**

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut di atas, diperlukan upaya-upaya pemecahan, antara lain sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta peningkatan motivasi yang mendorong etos kerja bagi Aparatur Pemerintah khususnya kemampuan keterampilan menyusun program/rencana kegiatan serta rencana penanganan penanggulangan bencana ;
2. Diperlukan adanya penambahan personil yang mumpuni sehubungan dengan mutasi (promosi) pegawai serta pegawai yang sudah memasuki masa pensiun dan meninggal dunia ;

3. Perlunya sarana alat komunikasi di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sumenep khususnya di wilayah kecamatan/daerah rawan bencana dan kecamatan kepulauan ;
4. Perlunya anggaran kebencanaan yang optimal sehingga lebih dapat menyebarluaskan informasi kebencanaan.

# Bab II

## Perencanaan Kinerja

### A. PERENCANAAN

Perencanaan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

#### 1. VISI

Pada hakekatnya membentuk visi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan yang berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep mendukung visi Kabupaten Sumenep yang merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kabupaten Sumenep harus dibawa. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Sumenep.

Pernyataan Visi Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

**“ S U P E R M A N T A P ”**

Yaitu “ Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih,  
Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional ”

## **2. MISI**

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi, diharapkan dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep beserta seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep harus melaksanakan misi yang telah ditetapkan. Misi tersebut merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep.

Terdapat 6 (enam) misi yang ditetapkan untuk mencapai visi, dan yang didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep adalah misi 4 (empat) yaitu meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Pernyataan Misi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Sumenep Tahun 2016-2020 yang akan didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep, antara lain :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan;
- 3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memperhatikan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan;
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

### ***3. TUJUAN DAN SASARAN***

Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Sumenep sebagai kepala daerah terpilih, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang mendukung dari misi tersebut, yang dijabarkan sebagai berikut:

Rumusan tujuan, sasaran dijelaskan berdasarkan indikator kinerja sasaran.

#### 1. KOMITMEN KINERJA TAHUN 2020

Komitmen kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2020 dan kondisi capaian tahun Tahun 2020, digambarkan pada rencana capaian indikator kinerja sasaran, yang diuraikan keselarasannya dengan misi dan tujuannya, adalah sebagai berikut :

Misi 4

***Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel,***

Tujuan 4.1

dengan tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,

Sasaran 4.1.2

dengan sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah daerah.

| Tujuan Renstra                                    | Indikator Tujuan | Target Kinerja | Sasaran Renstra  | Indikator Sasaran   | Target Kinerja | Program  | Kegiatan   | Anggaran    |
|---|------------------|----------------|--|---|----------------|--|--|-------------|
| Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah | Nilai SKM        | 81             | Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase kegiatan administrasi perkantoran yang terselenggara | 100%           | Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | 0           |
|   |                  |                |  |   |                |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | 89.400.000  |
|   |                  |                |  |   |                |  | Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor                        | 3.597.000   |
|   |                  |                |  |   |                |  | Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran                             | 20.298.000  |
|   |                  |                |  |   |                |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 7.570.000   |
|   |                  |                |  |   |                |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | 26.600.000  |
|   |                  |                |  |   |                |  | Penyediaan Makanan dan Minuman                                     | 13.608.000  |
|   |                  |                |  |   |                |  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi                              | 83.841.600  |
|   |                  |                |  |   |                |  | Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran                                | 168.512.500 |
|   |                  |                |  |   |                |  | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas   | 12.000.000  |

| Tujuan Renstra | Indikator Tujuan | Target Kinerja | Sasaran Renstra   | Indikator Sasaran                                    | Target Kinerja | Program   | Kegiatan  | Anggaran    |
|----------------|------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|-------------|
|                |                  |                |   |  |                |   | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Rumah Dinas                            | 10.000.000  |
|                |                  |                |   |  |                |   | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                          | 91.265.800  |
|                |                  |                |   |  |                |   | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas | 7.650.000   |
|                |                  |                |   |  |                | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur        | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | 10.000.000  |
|                |                  |                |   |  |                | Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Laporan Keuangan   | 2.090.000   |
|                |                  |                |   |  |                |   | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | 2.610.000   |
|                |                  |                | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat | Persentase tenaga penanggulangan bencana yang handal | 100%           | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan                      | Peningkatan Kemampuan Satuan Search And Rescue (SAR)                                | 287.524.000 |
|                |                  |                |   |  |                |   | Operasional SAR Speed Boat  | 242.880.000 |

| Tujuan Renstra | Indikator Tujuan | Target Kinerja | Sasaran Renstra  | Indikator Sasaran                                     | Target Kinerja | Program  | Kegiatan  | Anggaran    |
|----------------|------------------|----------------|--|---|----------------|--|---|-------------|
|                |                  |                |  |   |                |  | Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam                              | 39.696.000  |
|                |                  |                |  |   |                |  | Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana  | 87.876.000  |
|                |                  |                | Terlaksananya penanganan bencana secara cepat, tepat, efektif, dan efisien | Persentase penanganan bencana                         | 90%            | Program Kedaruratan dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik | Pengambilan, Pendistribusian dan Pengadaan Buffer Stock dan Peralatan Bagi Korban Bencana | 214.830.000 |
|                |                  |                |  |   |                |  | Operasional Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)          | 125.100.000 |
|                |                  |                | Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi                                | Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi | 90%            | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi                | Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam / Sosial                                     | 136.669.250 |

# Bab III

## *Akuntabilitas Kinerja*

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 digambarkan dengan capaian sasaran sebagaimana komitmen kinerja Tahun 2020 yang telah kami uraikan pada Bab II.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, di samping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2020. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil, sebagaimana yang telah kami uraikan pada Bab II.

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidak keberhasilan guna meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

## 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Misi 4

***Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel,***

Tujuan 4.1

dengan tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,

Sasaran 4.1.2

dengan sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Tujuan Renstra : Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan daerah

Sasaran Renstra :

1. Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat
3. Terlaksananya penanganan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien
4. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi

Tabel 3.1.1

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian Tahun 2020 |
|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4                    | 5                    |
| Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik  | Persentase kegiatan administrasi perkantoran yang terselenggara | 100%              | 100%                 | 100%                 |
| Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat | Persentase tenaga penanggulangan bencana yang handal            | 100%              | 100%                 | 100%                 |

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                     | Target Tahun 2020 | Realisasi Tahun 2020 | % Capaian Tahun 2020 |
|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4                    | 5                    |
| Terlaksananya penanganan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien | Persentase penanganan bencana                         | 90%               | 95%                  | 95%                  |
| Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi                             | Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi | 90%               | 100%                 | 100%                 |

**2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Misi 4

Tujuan 4.1

Sasaran 4.1.2

***Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel,***

dengan tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,

dengan sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Tujuan Renstra : Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan daerah

Sasaran Renstra :

1. Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat
3. Terlaksananya penanganan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien
4. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi

Tabel 3.1.2  
**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020  
 Dengan Tahun 2019**

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Target Tahun 2020 | Realisasi |          |          |
|---|---|-------------------|-----------|----------|----------|
|   |   |                   | Th. 2018  | Th. 2019 | Th. 2020 |
| 1   | 2   | 3                 | 4         | 5        | 6        |
| Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik  | Persentase kegiatan administrasi perkantoran yang terselenggara | 100%              | 94,73%    | 91,76%   | 100%     |
| Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat | Persentase tenaga penanggulangan bencana yang handal            | 100%              | 100%      | 100%     | 100%     |
| Terlaksananya penanganan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien   | Persentase penanganan bencana                                   | 90%               | 100%      | 100%     | 95%      |
| Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi   | Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi           | 90%               | 100%      | 100%     | 100%     |

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Misi 4

***Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel,***

Tujuan 4.1

dengan tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,

Sasaran 4.1.2

dengan sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Tujuan Renstra : Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan daerah

Sasaran Renstra :

1. Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat
3. Terlaksananya penanganan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien
4. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi

Tabel 3.1.3

| Sasaran Strategis  | Indikator kinerja   | Target Akhir Renstra Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2020 | Tingkat Kemajuan |
|--|---|---------------------------------|----------------------|------------------|
| Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase kegiatan administrasi perkantoran yang terselenggara | 100%                            | 100%                 | 100%             |

|   |   |      |      |      |
|---|---|------|------|------|
| Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat | Persentase tenaga penanggulangan bencana yang handal  | 100% | 100% | 100% |
| Terlaksananya penanganan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien   | Persentase penanganan bencana                         | 90%  | 95%  | 105% |
| Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi   | Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi | 90%  | 100% | 111% |

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Misi 4

Tujuan 4.1

Sasaran 4.1.2

***Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel,***

dengan tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,

dengan sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Tujuan Renstra : Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan daerah

Sasaran Renstra : 1. Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik  
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk

menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat

3. Terlaksananya penanganan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien
  4. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi
- Indikator persentase kegiatan administrasi perkantoran yang terselenggara ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2020 dan mengalami realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Hal ini dikarenakan semua kegiatan terlaksana dengan baik pada tahun 2020.
  - Indikator persentase tenaga penanggulangan bencana yang handal ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2020 dan mengalami realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan berjalan dengan baik dan lancar, seperti kegiatan Peningkatan Kemampuan Satuan Search And Rescue (SAR), Kegiatan Operasional Speed Boat, Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam, serta Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana.
  - Indikator persentase penanganan bencana ditargetkan sebesar 90% pada tahun 2020 dan mengalami realisasi sebesar 95% sehingga capaiannya sebesar 105%. Keberhasilan ini diraih berkat tersedianya tenaga yang tanggap dan handal dalam kebencanaan, kerja sama yang baik dengan pihak lain dan masyarakat, serta tersedianya kebutuhan peralatan, logistik maupun barang bantuan bagi korban bencana.
  - Indikator persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi ditargetkan sebesar 90% pada tahun 2020 dan mengalami realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 111%. Pada tahun 2020, ada tiga lokasi objek terdampak bencana, yaitu di Desa Juluk Kecamatan Saronggi, Desa Muangan Kecamatan

Saronggi, dan Desa Patean Kecamatan Batuan. Ketiga lokasi objek terdampak bencana tersebut berhasil direhabilitasi dan direkonstruksi sehingga keberhasilan indikator terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai 100%.

## 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Misi 4

***Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel,***

Tujuan 4.1

dengan tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,

Sasaran 4.1.2

dengan sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Tujuan Renstra : Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan daerah

Sasaran Renstra :

1. Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat
3. Terlaksananya penanganan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien
4. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi

**Cost Per Outcome**

## 1. Alokasi per Sasaran Pembangunan

Tabel 3.1.4

| <b>No</b>          | <b>Sasaran Strategis</b>  | <b>Indikator Sasaran</b>  | <b>Anggaran</b>      | <b>% Anggaran</b> |
|--------------------|---|---|----------------------|-------------------|
| <b>1</b>           | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>             | <b>5</b>          |
| 1                  | Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik  | Persentase kegiatan administrasi perkantoran yang terselenggara | 549.042.900          | 32,61%            |
| 2                  | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat | Persentase tenaga penanggulangan bencana yang handal            | 657.976.000          | 39,08%            |
| 3                  | Terlaksananya penanganan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien   | Persentase penanganan bencana                                   | 339.930.000          | 20,19%            |
| 4                  | Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi   | Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi           | 136.669.250          | 8,12%             |
| <b>J U M L A H</b> |   |   | <b>1.683.618.150</b> |                   |

## 2. Pencapaian Kinerja, Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Sasaran / Program   | Indikator   | Kinerja            |                    |                    | Anggaran                  |                           |                       | Tingkat Efisiensi    |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
|   |   | Target             | Realisasi          | % Capaian Kinerja  | Alokasi                   | Realisasi                 | % Penyerapan Anggaran |                      |
| <b><i>Sasaran 1</i></b><br><b><i>Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik</i></b> | <b><i>Persentase kegiatan administrasi perkantoran yang terselenggara</i></b> | <b><i>100%</i></b> | <b><i>100%</i></b> | <b><i>100%</i></b> | <b><i>549.042.900</i></b> | <b><i>488.584.661</i></b> | <b><i>88,99%</i></b>  | <b><i>11,01%</i></b> |
| Program :   |   |                    |                    |                    |                           |                           |                       |                      |
| 1.1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi   | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah                     | 100%               | 100%               | 100%               | 534.342.900               | 475.685.061               | 89,02%                | 10,98%               |
| 1.2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   | Persentase pengembangan potensi pegawai                                       | 100%               | 100%               | 100%               | 10.000.000                | 8.200.000                 | 82%                   | 18%                  |
| 1.3. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu  | 100%               | 100%               | 100%               | 4.700.000                 | 4.699.600                 | 99,99%                | 0,01%                |

|   |  |      |      |      |             |             |        |         |
|---|--|------|------|------|-------------|-------------|--------|---------|
| <u>Sasaran 2</u>  |  |      |      |      |             |             |        |         |
| Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat | Persentase tenaga penanggulangan bencana yang handal       | 100% | 100% | 111% | 657.976.000 | 585.409.127 | 88,97% | 22,03 % |
| <u>Program :</u>  |  |      |      |      |             |             |        |         |
| 2.1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan   | Tersedianya tenaga penanggulangan bencana yang handal      | 100% | 100% | 100% | 657.976.000 | 585.409.127 | 88,97% | 22,03 % |
| <u>Sasaran 3</u>  |  |      |      |      |             |             |        |         |
| Terlaksananya penanganan bencana yang cepat, tepat, efektif, dan efisien  | Persentase penanganan bencana                              | 90%  | 95%  | 105% | 339.930.000 | 280.186.500 | 82,42% | 22,58 % |
| <u>Program :</u>  |  |      |      |      |             |             |        |         |
| 3.1. Program Kedaruratan dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik   | Persentase pemenuhan kebutuhan dasar dalam tanggap darurat | 90%  | 95%  | 105% | 339.930.000 | 280.186.500 | 82,42% | 22,58 % |
| <u>Sasaran 4</u>  |  |      |      |      |             |             |        |         |
| Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi   | Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi      | 90%  | 100% | 111% | 136.669.250 | 79.844.600  | 58,42% | 52,58 % |

|  |  |     |      |      |             |            |        |         |
|--|--|-----|------|------|-------------|------------|--------|---------|
| <u>Program</u>                             |  |     |      |      |             |            |        |         |
| 4.1. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi | Pesentase pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana | 90% | 100% | 111% | 136.669.250 | 79.844.600 | 58,42% | 52,58 % |

## 6. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Kinerja

Misi 4

Tujuan 4.1

Sasaran 4.1.2

***Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel,***

dengan tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,

dengan sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Tujuan Renstra : Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan daerah

Sasaran Renstra :

1. Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat
3. Terlaksananya penanganan bencana yang cepat, tepat, efektif dan efisien
4. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi

Sasaran 1 yaitu meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator persentase kegiatan administrasi perkantoran yang terselenggara memiliki target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga mengalami keberhasilan dengan didukung oleh 3 (tiga) program, yakni Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi, Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, serta Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 549.042.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 488.584.661,-. Anggaran tersebut terserap sebesar 88,99% sehingga mengalami efisiensi anggaran sebesar 11,01%.

- 1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat termasuk dalam Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administasi merupakan kegiatan yang mencakup pengadministrasian surat menyurat.
- 1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik termasuk dalam Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administasi merupakan penyediaan jasa listrik, air, telepon, serta internet untuk kelancaran kegiatan yang dilaksanakan.
- 1.3. Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor termasuk dalam Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administasi merupakan kegiatan penyediaan alat dan bahan kebersihan.
- 1.4. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran termasuk dalam Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administasi merupakan kegiatan penyediaan kebutuhan alat tulis kantor serta pencetakan dan penggandaan dokumen.
- 1.5. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor termasuk dalam Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administasi merupakan kegiatan penyediaan kebutuhan alat listrik dan elektronik.
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan termasuk dalam Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administasi merupakan kegiatan penyediaan surat kabar, umbul-umbul, spanduk, serta iklan di media cetak maupun elektronik.
- 1.7. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman termasuk dalam Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administasi

- merupakan kegiatan penyediaan kebutuhan makanan dan minuman pegawai, tamu, serta rapat.
- 1.8. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi termasuk dalam Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administasi merupakan kegiatan dalam rangka rapat dan koordinasi baik ke luar daerah maupun di dalam daerah.
  - 1.9. Kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran termasuk dalam Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administasi merupakan kegiatan penyediaan jasa dalam hal administrasi perkantoran.
  - 1.10. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas termasuk dalam Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administasi merupakan kegiatan penyediaan peralatan serta barang perlengkapan guna menunjang aktivitas perkantoran.
  - 1.11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Rumah Dinas termasuk dalam Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administasi merupakan kegiatan dalam memelihara dan merawat gedung kantor.
  - 1.12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional termasuk dalam Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administasi merupakan kegiatan dalam memelihara dan merawat kendaraan dinas.
  - 1.13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas termasuk dalam Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administasi merupakan kegiatan dalam memelihara dan merawat peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
  - 1.14. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal termasuk dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur merupakan kegiatan diklat atau pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
  - 1.15. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan termasuk dalam Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

merupakan kegiatan penyusunan laporan-laporan yang berkaitan dengan keuangan.

- 1.16. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah termasuk dalam Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan penyusunan laporan-laporan yang berkaitan dengan perencanaan dan evaluasi kinerja OPD.

Sasaran 2 yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat dengan indikator persentase tenaga penanggulangan bencana yang handal memiliki target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga mengalami keberhasilan dengan didukung oleh 1 (satu) program, yakni Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dengan anggaran sebesar Rp. 657.976.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 585.409.127,-. Anggaran tersebut terserap sebesar 88,97% sehingga mengalami efisiensi anggaran sebesar 22,03%.

- 2.1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Satuan Search And Rescue (SAR) termasuk dalam Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan kegiatan pelatihan bagi anggota tim Search And Rescue (SAR) untuk meningkatkan kemampuan mereka.
- 2.2. Kegiatan Operasional SAR Speed Boat termasuk dalam Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan kegiatan pengoperasian Speed Boat dalam bersiaga dan menangani bencana di wilayah perairan.
- 2.3. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam termasuk dalam Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan kegiatan pemantauan lokasi rawan bencana, serta pemberian informasi dan edukasi terkait masalah kebencanaan.
- 2.5. Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana termasuk dalam Program Pencegahan dan

Kesiapsiagaan merupakan kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) serta pembinaan yang dilakukan terhadap DESTANA yang sudah dibentuk. Desa Tangguh Bencana dibentuk dengan harapan agar bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sumenep dapat berkurang dan kerugian yang ditimbulkan, baik berupa korban jiwa maupun kerugian materi, mampu diminimalisir. Hingga tahun 2020, BPBD Kabupaten Sumenep telah membentuk 18 (delapan belas) Desa Tangguh Bencana.

Sasaran 3 yaitu terlaksananya penanganan bencana yang cepat, tepat, efektif, dan efisien memiliki target kinerja sebesar 90% dan terealisasi sebesar 95% sehingga mengalami keberhasilan dengan didukung oleh 1 (satu) program, yakni Program Kedaruratan dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik dengan anggaran sebesar Rp. 339.930.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 280.186.500,-. Anggaran tersebut terserap sebesar 82,42% sehingga mengalami efisiensi anggaran sebesar 22,58%.

- 4.1. Kegiatan Pengambilan, Pendistribusian dan Pengadaan Buffer Stock dan Peralatan bagi Korban Bencana termasuk dalam Program Kedaruratan dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik meliputi penyediaan peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan bencana di antaranya tenda pengungsi, dapur umum, peralatan komunikasi, pelampung. Sedangkan barang logistik yang disediakan bagi korban bencana seperti makanan siap saji, selimut, sembako, dan lain-lain.
- 4.2. Kegiatan Operasional Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) termasuk dalam Program Kedaruratan dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik. Tenaga PUSDALOPS-PB di BPBD Kabupaten Sumenep berjumlah 16 (enam belas) orang yang siap memberi dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat, serta menyediakan data dan informasi terkait bencana.

Sasaran 4 yaitu terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki target kinerja sebesar 90% dan terealisasi sebesar 100% sehingga mengalami keberhasilan dengan didukung oleh 1 (satu) program, yakni Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan anggaran sebesar Rp. 136.669.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 79.844.600,-. Anggaran tersebut terserap sebesar 58,42% sehingga mengalami efisiensi anggaran sebesar 52,58%.

4.1. Kegiatan Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam / Sosial termasuk dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan kegiatan penanggulangan dan peningkatan kondisi sarana dan prasarana umum dalam rangka penanggulangan bencana.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut :

#### REALISASI KINERJA TAHUN 2020

| NO.   | TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN   | INDIKATOR  | TARGET      | REALISASI   | CAPAIAN     |
|-------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 1     | 2   | 3  | 4           | 5           | 6           |
| 1.    | <b>Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik</b> | <b>Persentase kegiatan administrasi perkantoran yang terselenggara</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 1.1.  | <b>Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi</b>                 | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah</b>       | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 1.1.1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan                           | 1000 surat  | 1739 surat  | 173%        |
| 1.1.2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | 12 bulan    | 12 bulan    | 100%        |
| 1.1.3 | Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor                            | Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor           | 13 jenis    | 13 jenis    | 100%        |
| 1.1.4 | Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran                                 | Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 TA                   | 32 jenis    | 32 jenis    | 100%        |
| 1.1.5 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor     | Jumlah komponen instalasi yang diadakan                                | 8 jenis     | 8 jenis     | 100%        |
| 1.1.6 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                   | 15 jenis    | 15 jenis    | 100%        |

| NO.         | TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN  | INDIKATOR   | TARGET      | REALISASI   | CAPAIAN     |
|-------------|--|---|-------------|-------------|-------------|
| 1           | 2  | 3   | 4           | 5           | 6           |
| 1.1.7       | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman  | Jumlah tersedianya makanan dan minuman  | 2 jenis     | 2 jenis     | 100%        |
| 1.1.8       | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi   | Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi                                     | 127 kali    | 66 kali     | 51%         |
| 1.1.9       | Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar  | Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan                        | 1 kali      | 0 kali      | 0%          |
| 1.1.10      | Kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran   | Jumlah layanan perkantoran yang disediakan  | 16 orang    | 16 orang    | 100%        |
| 1.1.11      | Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas                    | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli                                | 15 unit     | 1 unit      | 6%          |
| 1.1.12      | Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Rumah Dinas                            | Jumlah gedung kantor yang dipelihara  | 3 unit      | 3 unit      | 100%        |
| 1.1.13      | Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                          | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara                                | 24 unit     | 24 unit     | 100%        |
| 1.1.14      | Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas | Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara                     | 24 unit     | 24 unit     | 100%        |
| <b>1.2.</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                    | <b>Persentase pengembangan potensi pegawai</b>                                      | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 1.2.1       | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal   | Jumlah pegawai yang mengikuti diklat / pelatihan / bimtek                           | 3 orang     | 3 orang     | 100%        |
| 1.2.2       | Kegiatan Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian                                    | Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu                                    | 2 jenis     | 2 jenis     | 100%        |
| <b>1.3.</b> | <b>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                             | <b>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 1.3.1       | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan   | Jumlah laporan keuangan yang disusun  | 19 buku     | 19 buku     | 100%        |
| 1.3.2       | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun                        | 8 buku      | 8 buku      | 100%        |

| NO.   | TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN   | INDIKATOR  | TARGET     | REALISASI   | CAPAIAN     |
|-------|---|--|------------|-------------|-------------|
| 1     | 2   | 3  | 4          | 5           | 6           |
| 2     | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat | Persentase tenaga penanggulangan bencana yang handal                     | 100%       | 91%         | 91%         |
| 2.1.  | <b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>   | <b>Tersedianya tenaga penanggulangan bencana yang handal</b>             | 100%       | 100%        | 100%        |
| 2.1.1 | Kegiatan Peningkatan Kemampuan Satuan Search And Rescue (SAR)   | Jumlah satuan SAR BPBD   | 30 orang   | 30 orang    | 100%        |
| 2.1.2 | Kegiatan Operasional SAR Speed Boat   | Jumlah pelaksanaan operasi SAR Laut                                      | 36 kali    | 36 kali     | 100%        |
| 2.1.3 | Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam   | Jumlah daerah yang dipantau dan jumlah penyebaran informasi bencana alam | 20 lokasi  | 13 lokasi   | 65%         |
| 2.1.4 | Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana   | Jumlah desa yang difasilitasi sebagai Destana                            | 7 desa     | 7 desa      | 100%        |
| 3     | <b>Terlaksananya penanganan bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien</b>  | <b>Persentase penanganan bencana</b>                                     | <b>90%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 3.1.  | <b>Program Kedaruratan dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik</b>   | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan dasar dalam tanggap darurat</b>        | 90%        | 100%        | 100%        |
| 3.1.1 | Kegiatan Pengambilan, Pendistribusian dan Pengadaan Buffer Stock dan Peralatan Bagi Korban Bencana  | Persentase penanganan masalah logistik bagi korban bencana               | 90%        | 100%        | 100%        |
| 3.1.2 | Kegiatan Operasional Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)   | Jumlah tenaga PUSDALOPS yang terlatih                                    | 16 orang   | 16 orang    | 100%        |
| 4     | <b>Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi</b>  | <b>Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi</b>             | <b>90%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| 4.1.  | <b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>  | <b>Persentase pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana</b> | 90%        | 100%        | 100%        |
| 4.1.1 | Kegiatan Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam / Sosial  | Jumlah penanggulangan dan penyelesaian bencana                           | 10 lokasi  | 3 lokasi    | 33%         |

**B. REALISASI ANGGARAN**

Tabel 3.2.1

| <b>NO</b> | <b>PROGRAM / KEGIATAN</b>   | <b>ANGGARAN</b>    | <b>REALISASI</b>   |
|-----------|---|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi</b>                     | <b>534.342.900</b> | <b>475.685.061</b> |
| 1.1       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 0                  | 0                  |
| 1.2       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                             | 89.400.000         | 70.047.161         |
| 1.3       | Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor   | 3.597.000          | 3.597.000          |
| 1.4       | Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran  | 20.298.000         | 13.205.800         |
| 1.5       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                  | 7.570.000          | 7.538.600          |
| 1.6       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                            | 26.600.000         | 23.607.000         |
| 1.7       | Penyediaan Makanan dan Minuman  | 13.608.000         | 13.473.900         |
| 1.8       | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi   | 83.841.600         | 69.920.600         |
| 1.09      | Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran   | 168.512.500        | 166.310.000        |
| 1.10      | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas                    | 12.000.000         | 11.818.700         |
| 1.11      | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Rumah Dinas                            | 10.000.000         | 10.000.000         |
| 1.12      | Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional                            | 91.265.800         | 79.503.750         |
| 1.13      | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas | 7.650.000          | 6.662.550          |
| <b>2</b>  | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                           | <b>10.000.000</b>  | <b>8.200.000</b>   |
| 2.1       | Pendidikan dan Pelatihan Formal   | 10.000.000         | 8.200.000          |
| <b>3</b>  | <b>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                    | <b>4.700.000</b>   | <b>4.699.600</b>   |
| 3.1       | Penyusunan Laporan Keuangan   | 2.090.000          | 2.090.000          |

|          |   |                    |                    |
|----------|---|--------------------|--------------------|
| 3.2      | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 2.610.000          | 2.609.600          |
| <b>4</b> | <b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>   | <b>657.976.000</b> | <b>585.409.127</b> |
| 4.1      | Peningkatan Kemampuan Satuan Search And Rescue (SAR)                                      | 287.524.000        | 270.838.300        |
| 4.2      | Operasional SAR Speed Boat  | 242.880.000        | 196.065.377        |
| 4.3      | Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam                              | 39.696.000         | 35.947.000         |
| 4.4      | Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana  | 87.876.000         | 82.558.450         |
| <b>5</b> | <b>Program Kedaruratan dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik</b>                               | <b>339.930.000</b> | <b>280.186.500</b> |
| 5.1      | Pengambilan, Pendistribusian dan Pengadaan Buffer Stock dan Peralatan Bagi Korban Bencana | 214.830.000        | 163.246.500        |
| 5.2      | Operasional Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)          | 125.100.000        | 116.940.000        |
| <b>6</b> | <b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>  | <b>136.669.250</b> | <b>79.844.600</b>  |
| 6.1      | Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam / Sosial                                     | 136.669.250        | 79.844.600         |

# Bab IV

# PEMUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance.

Dalam perseptif, LKjIP ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Dari hasil penilaian, keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja sasaran berikut capaian kinerjanya, dengan rata-rata capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep termasuk kategori “**Baik**”.

Hasil evaluasi kinerja ini merupakan rangkuman hasil evaluasi kinerja dari semua Bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari masing-masing bidang pada umumnya bisa dikatakan baik. Meskipun begitu di dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran ini, harus dilakukan tindakan dan upaya untuk menanggulangnya. Dan diharapkan meskipun sedikit demi sedikit akan bisa menghilangkan kendala / hambatan yang ada menjadi tidak ada.